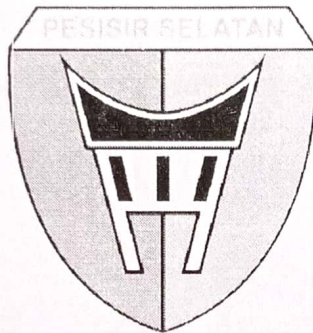


**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan dan kebudayaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si

NIP. 19701107 199702 1003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.2 Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	30
2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.	31
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021	
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
4.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat diatasnya Identifikasi tugas Pembantuan	
4.2 urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2021.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan pendidikan pada tahun 2021 untuk Kegiatan Urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 606.984.845.366,00 dengan realisasi Rp. 565.490.483.144,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka 93,16% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN							606.984.845.366	565.490.483.144
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					482.153.074.958	445.851.412.833
			Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99.333.736	81.948.350

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12	63.473.180	56.111.850
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersedianya biaya Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12	35.860.556	25.836.500
				2.Administrasi keuangan Perangkat Daerah					479.397.847.181	443.215.085.707
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASn pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan	bulan	12	12	479.242.447.181	443.065.685.707

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12	155.400.000	149.400.000
				3.Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah					103.644.900	98.657.400
				Pembinaan,Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pembinaan,pengawasan, dan Pengendalian Barang milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	103.644.900	98.657.400
				4.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah					342.037.370	341.382.150
				Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja pegawai	Terbitnya penilaian Angka Kredit(PAK) Pendidik dan tenaga Kependidikan	periode	3	3	178.847.640	178.650.350

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	1	1	99.836.100	99.487.800
				Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	1	1	63.353.630	63.244.000
				5.Administrasi Umum Perangkat Daerah					994.740.554	973.049.700
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	45.008.150	44.849.000
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Pada dinas	persen	100	99,98	99.816.824	99.800.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kantor	pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir selatan					
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir Selatan	persen	100	100	3.000.000	3.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	205.083.210	204.928.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir Selatan	bulan	12	12	92.580.570	92.579.600
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undngan pada dinas Pendidikan	bulan	12	12	48.000000	47.806.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					dan kebudayaan kab.Pesisir selatan					
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan Tamu pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	19.500.000	19.410.000
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada dinas pendidikan an kebudayaan kabuoaten pesisir selatan	bulan	12	12	366.366.500	363.711.500
				Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Tersedianya data dan Informasi dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	115.385.300	96.965.600
				6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					829.453.497	760.862.386

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Daerah						
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi ,Sumber Daya air dan Listrik pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Pesisir selatan	bulan	12	12	305.047.797	258.158.386
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	524.405.700	502.704.000
				7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah					386.017.720	380.427.140
				Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak	Tersedianya jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak ,dan Perizinan	bulan	12	12	179.412.720	173.899.140

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				k,dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terfasilitasinya Pemeliharaan peralatan Mesin Lainnya pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	31.650.000	31.650.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terfasilitasinya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung/kantor dan bangunan lainnya pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	174.955.000	174.878.000
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					113.029.047.095	109.337.879.231

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					71.054.757.178	69.298.774.598
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan Sekolah dasar	Persen	100	98,84	2.079.517.300	2.055.480.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksannanya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Dasar	Persen	100	97,72	2.006.312.700	1.960.590.336
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	persen	100	84,53	6.448.737.800	5.450.840.970
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru/kepala Sekolah/TU	persen	100	99,03	567.000.000	561.485.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	persen	100	99,25	618.779.700	641.122.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Sekolah Dasar					
				Rehabilitasi sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	persen	100	99,04	110.400.000	109.338.000
				Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	Persen	100	99,24	879.300.000	872.612.000
				Pengadaan Mebeleur Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Sekolah	Persen	100	98,37	1.074.692.690	1.057.220.550
				Pengadaan perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Persen	100	97,98	2.030.000.000	1.988.955.000
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar	Persen	100	90,10	408.160.209	367.751.000
				Penyediaan Biaya personil peserta	Tersedianya Biaya personil Peserta	bulan	12	12	1.728.848.800	1.317.300.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				didik sekolah dasar	didik					
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi peserta didik	Terlaksananya kegiatan AKM SD,Pembuatan master soal ujian bersama SD dan 3 pembuatan konten kreatif materi pembelajaran	bulan	3	3	206.232.244	198.579.900
				Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan dasar	Terlaksananya bimtek penguatan pengawas SD dan Penilaian Dokumen KTSP	keg	2	2	131.138.645	114.538.850
				Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar berupa festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Kompetisi olahraga siswa nasional(KOSN)dan kompetensi sains	bln	3	3	125.028.376	112.543.720

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					nasional(KSN)					
				Pengembangan Karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Peningkatan Guru SD	keg	3	3	1.528.329.830	1.411.236.884
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persen	100	98,43	374.464.499	368.579.800
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana BOS Sekolah dasar	Persen	100	100	50.492.612.238	50.492.612.238
				Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Monitoring pengelolaan dana BOS SD	persen	100	99,91	245.202.147	244.988.350
				2.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah					29.434.080.281	28.200.312.543

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pertama						
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah menengah pertama	persen	100	96,98	259.996.036	252.156.400
				Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Sekolah	persen	100	85,73	5.098.601.332	4.370.856.350
				Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	persen	100	97,72	500.823.992	489.403.000
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah menengah pertama	persen	100	86,95	144.000.000	125.202.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta didik sekolah menengah	Tersedianya biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	persen	100	85,49	1.108.980.000	948.099.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				pertama						
				Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa sekolah menengah pertama	persen	100	97,01	99.961.890	96.970.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Tersedianya soal PTS 1,PAS I,PTS 2,PAS 2,Ujian Sekolah,Kurikulum Sekolah,Media Pembelajaran,Sosialisasi Assesmen Nasional	persen	100	94,26	390.496.070	368.097.650
				Pembinaan Minat ,Bakat dan kreatifitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Minat,Bakat dan Keatifitas siswa menengah Pertama berupa Loma KSN,OGN,UKS/LSS FLS2N,KOSN,Debat Bahasa Indonesia ,Story Telling dan Pra-KSN	persen	100	59,77	556.132.820	332.405.350

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Verifikasi Bahan Sertifikasi pendidik, diklat PPG dan pelatihan assesmen dan pemanfaatan teknologi Pendidikan	persen	100	99,13	344.270.116	341.276.350
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah menengah Pertama	persen	100	81,58	138.749.180	113.193.510
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	persen	100	100	20.690.055.933	20.690.055.933
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bimbingan teknis dan Monitoring Pengelolaan dana BOS SMP	persen	100	71,16	102.012.912	72.597.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				3.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					9.267.523.040	8.631.074.300
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas /Ruang guru PAUD	Tersedianya sarana peningkatan mutu tingkat PAUD berupa rehabilitasi toilet(jamban) guru beserta sanitasinya,pembangunan area bermain beserta APE luar ruangan pengadaan alat pemulihan edukatif(APE) dan pengadaan buku koleksi PAUD	persen	100	98,49	293.302.190	288.887.850
				Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	persen	100	90,00	543.572.000	490.863.500
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya Pengadaan alat peraga edukatif (APE)	persen	100	89,14	203.575.430	181.461.700

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD	keg	1	1	249.323.096	247.243.900
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Kegiatan pelatihan pengelolaan DAPODIK PAUD	keg	1	1	130.565.476	124.774.550
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Biaya operasional Non personalia bagi satuan PAUD	persen	100	93,00	7.847.184.848	7.297.842.800
				4.Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					3.272.686.596	3.207.717.790
				Pengadaan ALat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya ALat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	persen	100	100	200.000.000	200.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar	persen	100	92,78	281.215.680	260.914.490

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan					
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan pelatihan penyelenggaraan pendidikan keluarga	keg	1	1	289.320.916	261.303.300
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Monformal/kesetaraan	Tersedianya dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	persen	100	99,33	2.502.150.000	2.485.500.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					121.705.379	106.564.500
				1.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar					74.029.373	59.059.400
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan	keg	1	1	74.029.373	59.059.400

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					dasar					
				2.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					47.676.006	47.505.100
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	keg	1	1	47.676.006	47.505.100
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					10.918.853.262	9.438.244.500
				1.Pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar,PAUD, dan					10.918.853.262	9.438.244.500

No	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	keg	1	1	10.918.853.262	9.438.244.500
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					448.990.880	445.584.880
				1.Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah					139.984.000	139.720.980
				Pembinaan Sumber Daya Manusia,lembaga, dan Pranata	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber daya Manusia,Lembaga,	Keg	1	1	139.984.000	139.720.980

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kebudayaan	dan Pranata Kebudayaan					
				2.Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota					309.006.880	305.863.900
				Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya event Kebudayaan Dengan Mengusung Kebudayaan Daerah demi Penguatan budaya Dearah Pesisir Selatan	Persen	100	98,98	309.006.880	305.863.900
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					313.173.792	310.797.200
				1.Pembinaan Kesenian yang MAsyarakat pelakunya dalam					100.000.000	100.000.000

[illegible]

2.2 Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	45,75	63,48	138,75
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	124,12	101,63	81,88
			APK SMP	105,77	102,28	96,70
			APM SD	99,9	98,91	99,00
			APM SMP	90,72	82,60	91,04
		Program Pendidikan Non Formal	Angka Putus Sekolah SD	0,07	0,24	29,16
			Angka Putus Sekolah SMP	0,12	1,25	9,6
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga	Rata-rata Nilai UN	-	-	-

		Kependidikan				
			Persentase Sekolah Berakreditasi A dan B	75	84,53	112,70
3	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional		Persentase seni budaya yang dilestarikan	50	45,95	91,9
4	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	50	44,45	88,9

2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meningkatkan Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

1. APK PAUD (Target Kinerja : 45,75%) (Realisasi Kinerja : 63,48 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2021), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD Sebanyak 1 Lokal. Jumlah Dana Rp.293.302.190 dan Terealisasikan Sebesar Rp.288.887.850 (98,49%)
 - Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Sebanyak 3 Ruang. Jumlah Dana Rp.543.572.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.490.863.500 (90,30%).
 - Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD Sebanyak 2 Sekolah. Jumlah dana Rp.203.575.430 dan Terealisasikan Sebesar Rp.181.461.700 (89,14%)
 - Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 1 kali Kegiatan. Jumlah dana Rp.249.323.096 dan Terealisasikan Sebesar Rp.247.243.900 (99,17%)
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali.Jumlah Dana Sebesar Rp.130.565.476 dan Terealisasikan sebesar Rp.124.774.550 (95,56%)
 - Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebesar Rp.7.847.184.848 Tersealisasi Sebesar Rp.7.297.842.800 (93,00%)

2. APK SD (Target Kinerja : 124,12%) (Realisasi Kinerja : 101,63%)

3. APK SMP (Target Kinerja : 105,77%) (Realisasi Kinerja : 102,28%)

4. APM SD (Target Kinerja : 99,9%) (Realisasi Kinerja : 98,91%)

5. APM SMP (Target Kinerja : 90,72%) (Realisasi Kinerja : 82,60%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah,dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Sebanyak 12 Sekolah.Jumlah dana Rp.2.079.517.300 Dan Terealisasikan sebesar Rp.2.055.480.000 (98,84%)

- Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 8 Sekolah. Jumlah Dana Rp.2.006.312.700 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.960.590.336 (97,72%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Dengan Dana Sebesar Rp.6.448.737.800 dan Terealisasikan Sebesar Rp.5.450.840.970 (84,53%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru/kepala sekolah/TU Sekolah Dasar Dengan output sebanyak 5 Sekolah dengan dana Sebesar Rp.567.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.561.485.000 (99,03%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar dengan Output 6 Sekolah Jumlah Dana Sebesar Rp.618.779.700 dan Terealisasi Sebesar Rp.614.122.000 (99,25%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah dengan output 5 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.110.400.000 dan Terealisasi Rp.109.338.000 (99,04%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah Dengan output Sebanyak 6 Sekolah dengan dana Sebesar Rp. 879.300.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.872.612.000 (99,24%)
- Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar Sebanyak 41 sekolah. Jumlah Dana Rp.1.074.692.690 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.057.220.550 (98,37%)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sebanyak 3 Paket. Jumlah dana Rp.2.030.000.000 Dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.988.955.000 (97,98%)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket. Jumlah dana Rp.408.160.209 dan Terealisasikan Sebesar Rp.367.751.000 (90,10%)
- Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah . Jumlah Dana Rp.1.728.848.800 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.317.300.000 (76,20%)
- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama
- Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah. Jumlah Dana Rp.259.996.036 dan Terealisasikan Sebesar Rp.252.156.400 (96,98%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dengan dana Sebesar Rp.5.098.601.332 dan Terealisasi Sebesar Rp. 4.370.856.350 (85,73%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas s
- ekolah dengan output 9 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.500.823.992 dan Terealisasi Sebesar Rp.489.403.000 (97,72%)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama 6 Sekolah Dengan Dana Sebesar Rp.144.000.000 dan terealisasi Rp.125.202.000 (86,95%)
- Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama Sebanyak 1 Sekolah. Jumlah Dana Rp.99.961.890 dan Terealisasikan sebesar Rp.96.970.000 (97,01%)
- Angka Putus Sekolah (Target Kinerja : 0,07) (Realisasi Kinerja : 0,24)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebanyak Rp.200.000.000 dan Terealisasi Sebanyak Rp.200.000.000 (100%)
 - Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan dengan output 92%.Jumlah Dana Rp.281.215.680 dan terealisasi Sebesar Rp.260.914.490 (92,78%)
 - Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 kegiatan dengan dana Rp.289.320.916 dan Terealisasi Sebesar Rp.261.303.300 (90,32%)
 - Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan Dana Sebesar Rp.2.502.150.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.2.485.500.000 (99,33%).

Meningkatkan Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Sekolah Berakreditasi A dan B (Target Kinerja : 75%) (Realisasi Kinerja : 84,53%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Penataan pendistribusian pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Tersedianya Jasa Pendidik Non PNS dengan Dana Sebesar Rp.10.918.853.262 dan Terealisasi Sebanyak Rp.9.438.244.500 (86,44%).

Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional, dengan indikator kinerja yaitu:

Persentase seni budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 50%) (Realisasi Kinerja : 45,95%)

Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 50%) (Realisasi Kinerja : 44,45%)

- Program Pengembangan Kebudayaan , Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah
 - Kegiatan Pembinaan sumber daya manusia,Lembaga,dan Pranata Kebudayaan Dengan Output ini terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia,lembaga, dan pranata Kebudayaan dengan dana Rp.139.984.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.139.720.980. (99,81%)
 - Kegiatan Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan,Objek Pemajuan Tradisi Budaya,dengan output ini Terlaksananya event Kebudayaan dengan mengusung kebudayaan daerah demi penguatan budaya daerah Pesisir Selatan dengan Dana Sebesar Rp.309.006.880 dan Terealisasi Sebesar Rp.305.863.900 (99,24%)

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya, Terlaksananya kegiatan Perawatan Cagar Budaya dengan Dana Sebesar Rp.313.173.792 dan Terealisasi sebesar Rp.310.797.200 (99,24%)

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

Nb.	Permasalahan	1. Kelebihan tenaga pendidik untuk beberapa mata pelajaran serta kekurangan guru untuk mapel lainnya pada satuan pendidikan SMP serta kekurangan tenaga pendidik yang PNS pada satuan pendidikan SD; 2. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD; 3. Kondisi sarana Prasarana Sekolah masih ada yang kurang maupun dalam kondisi rusak 4. Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya; 5. Keterbatasan sumber daya dalam mengelola kebudayaan; 6. Keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan guna mendukung Pembelajaran Jarak jauh. 7. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Home Laearning (Belajar dirumah) bagi Siswa SD dan SMP terkait Dampak Covid-19 8. Kekurangan Sarana Prasarana Pendukung Protokol Covid-19 di Sekolah. 9. Terhentinya event-even Kebudayaan dikarenakan wabah Covid-19
	Solusi	1. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan pengusulan mutasi dan rotasi guru melalui BKPSDM kabupaten pesisir selatan 2. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah memfasilitasi guru yang belum memiliki ijazah S1 untuk kuliah melalui jalur Universitas terbuka (UT) Serta melakukan pengusulan tunjangan kualifikasi melalui kementrian pendidikan kebudayaan ,riset dan Teknologi. 3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Maupun Dana APBD pada tahun 2021. 4. Salah satu upaya dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mempermudah akses pelayanan pendidikan dengan mengusulkan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Serta menyediakan biaya Operasional berupa alat angkutan apung bermotor di kawasan kapo-kapo kecamatan koto XI tarusan untuk memfasilitasi siswa SD maupun SMP untuk bersekolah di sungai nyalo tarusan. 5. Meskipun ditengah pandemi covid-19 dinas pendidikan dan kebudayaan tetap berusaha mengikuti, memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan kebudayaan baik yang bersifat pelestarian, pemanfaatan maupun pengiriman tim kebudayaan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
		:

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPD BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
1	Kita menyadari Bahwa Mutu Pendidikan di Kabupaten Pesisir selatan Masih Jauh dari yang kita harapkan sebagai salah satu indikatornya adalah masih sedikitnya anak-anak kita yang tidak mampu berkopetensi dengan daerah lain dalam mengikuti masuk Perguruan Tinggi negri apalagi Perguruan Tinggi yang Ternama.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,kewenangan Pendidikan menengah (SMA dan SMK) adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi Intervensi Pemerintah Kabupaten Kota Terhadap siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi boleh dikatakan tidak ada. Namun demikian Pemerintah kabupaten pesisir selatan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah mengupayakan melakukan pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa jenjang sekolah menengah pertama(SMP) untuk persiapan memasuki jenjang pendidikan Menengah.
2	Untuk Meningkatnya Mutu Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sarana dan prasarana sangat menentukan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sarankan kepada Pemerintah. Agar dapat pemerintah Daerah mengajukan Proposal ke pemerintah Pusat untuk Mendapatkan dana Pembangunan sarana dan prasarana. Baik itu untuk rehab gedung maupun pembangunan gedung baru dan saran penunjang lainnya seperti halnya untuk pembangunan gedung baru SD dan SMP di Kecamatan Sutura. Memperbaiki fasilitas jalan menuju sekolah, sehingga kenyamanan dan keselamatan anak didik akan dapat terjamin. Hal ini perlu kami tegaskan karena masih banyak kami temui fasilitas jalan menuju sekolah SD No.30 Koto Baru rawang Nagari Sungai Tunu Barat dan juga jalan menuju SMA Ranah	Pada Tahun 2021 untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khususnya sekolah, dinas Pendidikan telah meluncurkan dana sebesar Rp.16.222.900.399 untuk Sekolah Dasar dan Rp. 5.098.601.332 untuk Sekolah Menengah Pertama baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Maupun APBD. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana SD dan SMP Sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sedangkan untuk jalan menuju sekolah bukan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maupun Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Melalui Dana DAK. Meskipun Demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Telah Menyampaikan Kepihak Terkait dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi.

No	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
	Pesisir masih terbengkalai dan juga masih banyak jalan yng menuju akses pendidikan yang butuh perhatian khusus.	
3	Untuk Meningkatkan Capaian APK dan APM baik tingkat SD maupun SMP sesuai target kinerja yang telah ditetapkan diminta Pemerintah Daerah menyusun regulasi dibidang Pendidikan yang terukur dan teruji dengan melibatkan pihak luar yang mempunyai kompetensi untuk itu. Selain hal tersebut diminta juga Pemerintah Daerah mengiatkan pelatihan diklat MGMP,KKG dan KKS. Pada saat ini kegiatan tersebut nyaris tidak berjalan. Pada hal wadah ini salah satu peningkatan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dari Pantauan kami dilapangan dalam hal kinerja guru, kami temukan banyak guru-guru yang mengajar di suatu sekolah sudah puluhan tahun dampak dan kondisi tersebut daya saing/kopetensi guru tersebut berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Cuma sekedar untuk melakukn rutinitas mengajar saja, tidak ada berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada Pemerintah Daerah Segera lakukan Mutasi roling dan penyegaran bagi guru-guru yang sudah lama bertugas (10 Tahun dan 15 tahun) ke atas dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pengawas sekolah baik tingkat SD dan SMP.	Tentang capaian APK dan APM baik tingkat SD dan SMP sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Tentang Regulasi di Bidang Pendidikan, memang pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pendidikan akan merancang regulasi tersebut berupa Perda Pendidikan yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan. Pemda akan mencoba mengalokasikan anggaran untuk mengusulkan ke DPRD rancangan perda Pendidikan melalui kajian naskah Akademik sampai ditetapkan regulasi (Perda Pendidikan) di KabupatenPesisir Selatan tentu semuanya tidak terlepas dari dorongan semua pihak termasuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku Lembaga Legislatif yang punya kewenangan dalam pembuatan perundang-undangan di Daerah.Terkait dengan kegiatan MGMP, KKG dan KKS. MGMP,KKG,MKKS adalah organisasi mandiri dibawah binaan Dinas Pendidikan selaku Badan Pembina Organisasi ditahun 2019 s/d 2021. Organisasi yang menjadi wadah pengembangan profesi guru dan Kepala Sekolah tidak berjalan sebagai mana mestinya karena kita dalam keadaan PandemiCovid 19. Pada tahun 2022 Dinas kembali menata keorganisasian tersebut dan sudah berjalan dengan menjadikan pemecahan organisasi tersebut menjadi beberapa rayon untuk MGMP dan gugus di tingkat SD untuk lebih Efektifnya pelayanan pengembangan Profesi Guru dan Kepala Sekolah mengingat kondisi geografis kabupaten Pesisir Selatan dari Utara sampai

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
		daerah paling Ujung di Selatan. Tentang Mutasi Guru, Mutasi Guru tetap berjalan sesuai aturan Juknis yang berlaku,namun dilaksanakan secara bertahap. Ada yang berdasarkan permintaan sendiri dan juga melalui usulan secara kolektif untuk memenuhi standar nasional Pendidikan untuk menindaklanjuti Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pasal 4 ayat 3 pelaksanaan pembelajaran harus dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Identifikasi tugas Pembantuan

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada mendapat dana tugas Pembantuan (TP). Dana Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyalurkan anggaran terkait Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik (PAUD,SD dan SMP) maupun DAK Non Fisik (BOS SD,SMP dan BOP PAUD Kesetaraan).

4.2 Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 21.272.168.000, terdiri dari DAK Paud Rp.623.092.000, DAK SD Rp.15.406.472.000 dan DAK SMP Rp.5.242.604.000. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Juga Menerima Sebesar Rp. 162.610.138.000, terdiri dari BOP PAUD Rp.7.086.000.000, BOP Kesetaraan Rp.2.485.500.000, Tunjangan Guru Rp.150.052.821.000, Penghasilan Guru Rp.750.000.000 dan Tunjangan Khusus Guru Rp.2.235.817.500. Selain Dana DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp.50.312.612.238 untuk BOS SD dan Rp.20.650.055.933 untuk BOS SMP.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.